

**PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH**  
**(Studi di Kantor Camat Sidikalang Kabupaten Dairi)**

**TESIS**

**OLEH**

**MAROJAHAN PARDOSI**  
**NPM. 131801065**



**PROGRAM STUDI MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
**UNIVERSITAS MEDAN AREA**  
**MEDAN**  
**2015**

**UNIVERSITAS MEDAN AREA  
PROGRAM PASCASARJANA  
MAGISTER ADMINISTRASI PUBLIK**

**HALAMAN PERSETUJUAN**

**Judul : Profesionalisme Aparatur Pemerintah (Studi Di Kantor Camat Sidikalang Kabupaten Dairi)**

**Nama : Marojahan Pardosi**

**NPM : 131801065**

**Menyetujui**

**Pembimbing I**



**Dr. Warjio, MA**

**Pembimbing II**



**Drs. Kariono, MA**

**Ketua Program Studi  
Magister Administrasi Publik**



**Dr. Warjio, MA**

**Direktur**



**Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS**

**Telah diuji pada Tanggal 27 Juni 2015**

---

---

**Nama : Marojahah Pardosi  
NPM : 131801065**



**Panitia Penguji Tesis :**

**Ketua : Drs. Usman Tarigan, MS**

**Sekretaris : Isnaini, SH, M.Hum**

**Pembimbing I : Dr. Warjio, MA**

**Pembimbing II : Drs. Kariono, MA**

**Penguji Tamu : Dr. Abdul Kadir, SH, M.Si**

## **PERNYATAAN KEORISINILAN**

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

**Nama : Marojahan Pardosi**  
**NPM : 131801065**

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi, dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan,      Juni 2015

Yang menyatakan,

Marojahan Pardosi



## ABSTRAK

### **PROFESIONALISME APARATUR PEMERINTAH PADA KECAMATAN SIDIKALANG KABUPATEN DAIRI**

**Nama : Marojahan Pardosi  
NPM : 131801065  
Program Studi : Magister Administrasi Publik  
Pembimbing I : Dr. Warjio, MA  
Pembimbing II : Drs. Kariono, MA**

Birokrasi Publik Indonesia selalu dihadapkan kepada masalah bagaimana membangun pemerintahan yang baik dan bersih (good governance and clean governance). Upaya untuk mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan secara baik dan benar termasuk didalamnya penyelenggaraan pelayanan publik yang memerlukan unsur mendasar antara lain adalah unsur profesionalisme dari penyelenggara pemerintahan dan pelayan publik. Sebagai bagian dari aparat yang profesional, pemerintah dituntut untuk mampu merespon aspirasi publik kedalam program dan kegiatan organisasi dan juga harus mampu melahirkan inovasi baru yang bertujuan untuk mempermudah kinerja organisasi. Terbaikannya unsur profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi pemerintahan akan berdampak kepada menurunnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Aparatur yang profesional diharapkan mampu memberikan pelayanan yang baik kepada masyarakat. Pelayanan yang baik memiliki hubungan yang erat dengan kepuasan masyarakat.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis profesionalisme aparatur di Kantor Camat Sidikalang dalam menjalankan tugas dan fungsi organisasi secara profesional terutama dari aspek responsifitas dan inovasi serta menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi profesionalisme aparatur di Kantor Camat Sidikalang dalam mengembangkan aparatur yang profesional. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dimana peneliti terjun langsung ke lapangan untuk meneliti obyek kajiannya dan mengadakan interaksi langsung dengan masyarakat yang bertujuan untuk mendapatkan informasi yang mendalam mengenai profesionalisme aparatur di Kecamatan Sidikalang sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan prilaku yang diamati.

Secara keseluruhan aparatur pemerintah Kecamatan Sidikalang dalam belum dapat mengakomodir semua harapan dan aspirasi masyarakat dan menciptakan metode kerja baru untuk mendapatkan pelayanan yang lebih baik, namun Kecamatan Sidikalang tetap memiliki komitmen dan berupaya untuk menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik.

**Keywords :** Profesionalisme aparatur, responsifitas, inovasi.

## ABSTRACT

### **THE PROFESIONALISM OF GOVERNMENT OFFICIALS (STUDY AT HEAD OFFICE SIDIKALANG) DISTRICT DAIRI**

**Name : Marojahan Pardosi  
NPM : 131801065  
Study Program : Magister Administrasi Publik  
Adviser I : Dr. Warjio, MA  
Adviser II : Drs. Kariono, MA**

Public bureaucracy Indonesia has always faced the problem of how to build good and clean governance. Efforts to achieve good governance and correct manner including the implementation of public service that requires basic elements include an element of professionalism of the organizers of government and public servants. As part of the professional apparatus, the government is required to respond to public aspirations into the programs and activities of the organization and also to be able to bring new innovations that aim to facilitate the performance of the organization. Neglect of elements of professionalism in carrying out the duties and functions of government organizations will have an impact on the declining quality of governance and public services. Apparatus professionals are expected to provide good service to the community. Good service has a close relationship with the community satisfaction.

This study aimed to describe and analyze the professionalism of personnel in Sidikalang Head Office in carrying out the duties and functions of the organization in a professional manner, especially from the aspect of responsiveness and innovation, and analyzes the factors that influence the professionalism of personnel at Head Office Sidikalang in developing professional personnel. This study used a qualitative research method where researchers went to the field to examine the object of study and hold a direct interaction with the public to get in-depth information about the professionalism of officials in the District Sidikalang resulting descriptive data in the form of words written or spoken of the people and behavior were observed.

Overall government officials in the District Sidikalang can not accommodate all the hopes and aspirations of the community and create new working methods to get better service, However the District of Sidikalang remain committed and attempted to carry out its duties and functions well.

**Keywords:** Professionalism apparatus, responsiveness, innovation.

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini sebagai syarat untuk memperoleh gelar Magister Administrasi Publik pada Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area. Adapun judul tesis ini adalah “Profesionalisme Aparatur Pemerintah (Studi pada Kecamatan Sidikalang)”.

Penyelesaian tesis ini tidak terlepas dari bantuan, dukungan, motivasi dan partisipasi berbagai pihak, baik secara moril dan materil yang diberikan kepada penulis. Untuk itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. A. H. M. Ya'kub Matondang, MA, Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS, Direktur Program Pasca sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Warjio, MA, Ketua Program Studi MAP, Program Pasca Sarjana Universitas Medan Area sekaligus sebagai Pembimbing I, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini.
4. Bapak Drs. Kariono, MA, sebagai Pembimbing II, yang telah banyak memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyelesaian tesis ini.
5. Bapak Camat Sidikalang dan jajaran aparatur Pemerintah Kecamatan Sidikalang Kabupaten Dairi atas segala bantuan dan fasilitas yang diberikan selama penulis mengadakan penelitian.

6. Bapak dan Ibu dosen Program Pasca Sarjana Magister Administrasi Publik Universitas Medan Area yang telah memberikan bekal ilmu serta kelancaran dalam proses penyusunan dan penyelesaian tesis ini.
7. Terima kasih pula kepada Isteri tercinta dan anak-anakku tersayang dan semua pihak yang telah memberikan dukungan serta seluruh keluarga yang senantiasa memberikan dorongan, semangat dan doa demi keberhasilan dan kesuksesan penulis.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penulisan tesis ini masih jauh dari sempurna dan banyak kekurangan serta kelemahan mengingat keterbatasan penulis. Untuk itu penulis mengharapkan saran dan masukan yang bersifat membangun demi kesempurnaan dimasa yang akan datang.

Akhir kata semoga Tuhan Yang Maha Kuasa selalu melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya. Penulis berharap semoga tesis ini dapat bermanfaat serta menambah pengetahuan dan wawasan bagi kita semua. Amin.

Medan, Juni 2015

Penulis,

**Marojahan Pardosi**

## DAFTAR ISI

	<i>Halaman</i>
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
1.1 Latar Belakang Masalah .....	1
1.2 Perumusan Masalah .....	12
1.3 Tujuan Penelitian .....	12
1.4 Manfaat Penelitian .....	13
<b>BAB II : TINJAUAN PUSTAKA</b>	
2.1 Konsep Profesionalisme .....	14
2.2 Tolak Ukur Profesionalisme .....	18
2.3 Faktor Penghambat Profesionalisme .....	21
2.4 Konsep Responsifitas .....	23
2.5 Konsep Inovasi .....	24
2.6 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Profesionalisme Aparatur .	28
1. Visi-Misi Organisasi .....	28
2. Struktur Organisasi .....	29
3. Kepemimpinan .....	32
4. Penghargaan .....	34
<b>BAB III : METODE PENELITIAN</b>	
3.1 Perspektif Pendekatan Penelitian.....	36
3.2. Fokus Penelitian .....	37
3.3 Waktu dan Tempat Penelitian.....	37
3.4 Fenomena Pengamatan.....	38
3.5. Jenis dan Sumber Data .....	40
3.6 Pemilihan Informan .....	40
3.7 Teknik Pengumpulan Data .....	41
3.8 Teknik Analisis Data .....	42

<b>BAB IV : GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN, HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
4.1 Kondisi Geografis .....	46
4.2 Kondisi Demografis .....	47
4.3 Organisasi Kecamatan .....	51
4.4 Hasil Penelitian .....	55
4.5 Pembahasan .....	77
<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN</b>	
5.1 Kesimpulan .....	85
5.2 Saran .....	87
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>89</b>

## DAFTAR TABEL

*Halaman*

Tabel 1	Rekapitulasi Data PNS berdasarkan Golongan/Ruang di Lingkungan Kecamatan Sidikalang Kab. Dairi Tahun 2014 .....	8
Tabel 2	Rekapitulasi Data PNS berdasarkan Tingkat Pendidikan di Lingkungan Kecamatan Sidikalang Kab. Dairi Tahun 2014 .....	9
Tabel 3	Fenomena yang Diteliti .....	38
Tabel 4	Banyaknya penduduk yang dirinci menurut jenis kelamin dan kelompok umur .....	47
Tabel 5	Banyaknya penduduk menurut jenis kelamin dan desa/kelurahan	48
Tabel 6	Banyaknya SD, SLTP dan SLTA dirinci menurut desa/kelurahan .....	49
Tabel 7	Banyaknya Sarana Kesehatan menurut desa/kelurahan .....	50
Tabel 8	Banyaknya Sarana Ibadah menurut desa/kelurahan .....	50
Tabel 9	Banyaknya Perusahaan Industri dan Tenaga Kerja .....	51
Tabel 10	Komposisi Pegawai Kecamatan Sidikalang menurut Kualifikasi Pangkat dan Pendidikan .....	54
Tabel 11	Komposisi Pegawai Kecamatan Sidikalang menurut Kualifikasi Golongan dan Jabatan Struktural .....	55

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Bangsa Indonesia selalu dihadapkan kepada masalah bagaimana membangun pemerintahan yang baik dan bersih (*good and clean governance*). Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, membawa paradigma baru yang lebih menekankan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan dan kekhasan suatu daerah.

Upaya untuk mewujudkan *good governance* memerlukan unsur profesionalisme dari aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik. Profesionalisme disini lebih menekankan kepada kemampuan, ketrampilan dan keahlian aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan publik yang responsif, inovatif, transparan, efektif dan efisien.

Didalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dalam bagian menimbang butir b dinyatakan bahwa membangun kepercayaan masyarakat atas pelayanan publik yang dilakukan penyelenggara pelayanan publik merupakan kegiatan yang harus dilakukan seiring dengan

harapan dan tuntutan seluruh warga negara dan penduduk tentang pelayanan publik.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik menyatakan bahwa pelayanan publik adalah rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Setiap penyelenggara pelayanan publik wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan.

Selanjutnya dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan, diamanatkan bahwa dalam penyusunan, penetapan dan penerapan Standar Pelayanan dilakukan dengan memperhatikan prinsip :

1. Sederhana (standar pelayanan yang mudah dimengerti, mudah diikuti, mudah dilaksanakan, mudah diukur, dengan prosedur yang jelas dan biaya yang terjangkau).
2. Partisipatif (penyusunan Standar Pelayanan dengan melibatkan masyarakat dan pihak terkait untuk membahas bersama dan mendapatkan keselarasan atas dasar komitmen atau hasil kesepakatan).
3. Akuntabel (hal-hal yang diatur dalam standar pelayanan harus dapat dilaksanakan dan dipertanggungjawabkan kepada pihak yang berkepentingan).
4. Berkelanjutan (standar pelayanan harus terus menerus dilakukan perbaikan sebagai upaya peningkatan kualitas dan inovasi pelayanan).

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku-buku :

- Ancok, Djamaruddin, 1999. *Revitalisasi SDM Dalam Menghadapi Perubahan Pada Pasca Krisis* (makalah)
- Alston, Margareth and Wendy Bowles, 1998. *Research for social workers : An introduction to methods*, Allen and Unwin : Australia
- Boone, Tommy, 2001. *Cultivating the Values of Professionalism Professor's Point of View, Journal Physiologists*, An International Electronic Journal for Exercise Physiologists, Vol. 4 No. 1
- Chan, Lismen L.M, Shaffer, Margaret A, & Snape, ED, 2004. *In Search of Sustained Competitive Advantage : The impact of organizational culture, Competitive strategy and human resource management practices on firm performance*. International journal of Human Resource Management. 15 (1) : 17 – 35
- Dwiyanto, Agus, 1995. *Kinerja Organisasi Publik, Kebijakan dan Penerapannya*, (makalah)
- Dwiyanto, Agus, 2011. *Mengembalikan Kepercayaan Publik Melalui Reformasi Birokrasi*, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Utama
- Farazmand, Ali, 2004. *Sound Governance : Policy and Administrative Innovations*. Praeger Publisher, Westport, CT
- Gibson, Invancevich, Donnelly, 1995. *Organizations*, Richard. D. Irwin. Inc
- Ghobadian, Abby, and Ashworth, John, 1994. *Performance Measurement in Local Government-Concept and Practice*. International Journal of Operations & Production Management, Vol. 14 No. 5
- Juanda, Khairy, 2010. *Profesionalitas Aparatur Sekretariat Daerah (Studi di Pemerintah Kabupaten Sumbawa, NTB)*, Jurnal Studi Pemerintahan Vol. 1 No.1
- Kartono, Kartini, 1998. *Pemimpin dan Kepemimpinan*, Jakarta Mintzberg, Henry, 1983. Structure In five : Designing Effective Organizations, Prentice-Hall, Jakarta : Grafindo
- Kurniawan, Agung, 2005. *Transformasi Pelayanan Publik*, Yogyakarta: Pembaruan

LGSP-Legislative Strengthening Team, 2009. *Pengawasan DPRD terhadap pelayanan publik*, Jakarta : LGSP-USAID

Moleong, Lexy, 2000. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung : Remaja Rosdakarya

Mulgan, G & Albury, D. (2003). *Innovation in the public sector*. Strategy Unit, Cabinet Office. Octob

Numberi, Fredy, 2000. *Organisasi dan Administrasi Pemerintah*, Makalah Osborne, David & Gaebler, Ted, 1982, Mewirausahaakan Birokrasi (terjemahan), Jakarta : PPM

Osborne, David, Ted Gaebler, 1992. *Reinventing Government : How to entrepreneurial spirit is transforming the public sector*, Addison – Wesley

Osborne, David & Plastrik, Peter, 1997. *Memangkas Birokrasi* (terjemahan), Jakarta : PPM

Osborne, Stephen P and Brown, Kerry Brown, 2005. *Managing Change and Innovation In Public Service Organization*, New York, Routledge

Pamudji, 1985. *Ekologi Administrasi Negara*, Jakarta : Bina Aksara

Pramusinto, Agus, 2009. *Reformasi Tanpa Peningkatan Kesejahteraan: Bagaimana Memberikan Energi untuk Birokrasi* dalam Agus Pramusinto dan Wahyudi Kumorotomo, Governance Reform in Indonesia: Mencari Arah Kelembagaan Politik yang Demokratis dan Birokrasi yang Profesional, Yogyakarta : Gava Media dan MAP-UGM

Salusu, J, 1996. *Pengambilan Keputusan Stratejik untuk Organisasi Publik dan Non Profit*, Jakarta : Gramedia

Siagian, Sondang P, 2000. *Administrasi Pembangunan*, Jakarta : Bumi Aksara

Sianipar,J.P.G, 2002. *Manajemen Pelayanan Masyarakat*, Jakarta : Lembaga Administrasi Negara

Solihin, Dadang, 2007. *Indikator Governance dan Penerapannya dalam Mewujudkan Demokratisasi di Indonesia*, [www.dadangsolihiin.com](http://www.dadangsolihiin.com)

Wallace, Joseph, Hunt, James & Richards, Christoper, 1999. *The relationship between organisational cultur, organisational climate and managerial values*. The internasional journal of Public Sector management, 12 (7) : 548-564

Widodo, Joko, 2007. *Membangun Birokrasi Berbasis Kinerja*, Jakarta : Bayu Media Publish

Wright, Philip C, & Rudolph, Jake J, 1994. *HRM trends in the 1990's : Should Local Government Buy in ?* International Journal of Public Sector Management. 7 (3) : pp.27-43

Wright, Peter.,Kroll,J.Mark, Parnel, John,1996, *Strategic Management Concept and Cases*, New Jersey, Prentice Hall

Thoha, Miftah, 1999. *Perilaku Organisasi* (Cetakan X) Jakarta : Rajawali Pers

Tjokrowinoto, Muljarto, 1996. *Pembangunan, Dilema dan Tantangan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar

### **Peraturan Perundangan :**

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang *Pelayanan Publik*.

Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang *Aparatur Sipil Negara*

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang *Pemerintahan Daerah* sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik*

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang *Pedoman Standar Pelayanan*

Peraturan Daerah Kabupaten Dari Nomor 04 Tahun 2008 tentang *Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi*.

Peraturan Bupati Dairi Nomor 14 Tahun 2008 Tentang *Tugas Pokok dan Uraian Tugas Tiap-tiap Jabatan Pada Kecamatan dan Kelurahan Kabupaten Dairi.*